

Judul : Jangan Lupakan Kasus Hambalang
Tanggal : Kamis, 16 Mei 2013
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : 3

Jangan Lupakan Kasus Hambalang

[JAKARTA] Publik masih menunggu penuntasan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, terutama berkaitan dengan sejumlah tersangka yang sampai saat ini belum juga ditahan atau diajukan ke pengadilan. Di sisi lain, hasil audit investigasi tahap II dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun tak kunjung rampung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR masih menunggu hasil laporan BPK. Bahkan, pimpinan KPK sudah merencanakan untuk mengadakan pertemuan dengan BPK pada pekan ini untuk membahas kerugian negara dalam kasus itu. KPK menegaskan, penahanan beberapa tersangka tidak bisa dilakukan jika belum ada laporan BPK.

Ketua BAKN Sumarjati Arjoso mengatakan, pihaknya tidak bisa mendesak BPK untuk mempercepat proses penyelesaian audit tahap II tersebut. "Sampai sekarang, audit tahap II belum diberikan. BAKN sudah pernah menanyakan, tapi masih belum ada juga. Karena itu, kami tetap menunggu BPK untuk menyerahkan hasil audit itu," kata Sumarjati kepada *SP* di Jakarta, Kamis (16/5).

Dia menjelaskan, BAKN hanya menindaklanjuti hasil audit yang akan diserahkan KPK nanti. Setelah itulah, BAKN menganalisis laporan itu lalu memberikan rekomendasi kepada instansi terkait.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas dan Internasional BPK Bachtiar Arief mengakui, sampai saat ini BPK belum menyelesaikan audit tahap II kasus Hambalang. Meski demikian, BPK berkeinginan kuat mendukung KPK dalam memperlancar penyidikan kasus Hambalang. BPK terkendala dengan pengumpulan bukti yang kompeten.

Dalam audit tahap I, BPK menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 243,66 miliar. Temuan itu berdasarkan hasil pemeriksaan hingga 30 Oktober 2012. Rincian kerugian negara itu, Rp 116,93 miliar merupakan selisih pembayaran uang muka yang telah dilaksanakan sebesar Rp 189,45 miliar dikurangi pengembalian uang muka pada saat pembayaran pada 2010-2011 sebesar Rp 72,52 miliar.

Lalu, uang sebesar Rp 126,734 miliar merupakan kelebihan pembayaran harga pada pelaksanaan konstruksi. Kelebihan itu terdiri dari mekanikal elektrik sebesar Rp 75,724 miliar dan pekerjaan struktur se-

besar Rp 51,01 miliar.

Kerja BPK dalam mengaudit proyek Hambalang sempat menuai kontroversi. Kontroversi bermula saat anggota BPK Taufiequrrachman Ruki mengungkapkan dugaan intervensi dalam laporan hasil audit proyek tersebut. Namun, pernyataan Ruki ini dibantah Ketua BPK Hadi Purnomo. Dia menegaskan, tak ada intervensi dalam audit BPK mengenai proyek Hambalang.

Proses Penghitungan

Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan, pemberkasan tersangka Andi A Mallarangeng tak kunjung selesai karena jumlah kerugian negara yang masih dalam proses penghitungan oleh BPK. Dia menjelaskan, penghitungan kerugian negara penting dalam kasus itu, karena Andi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor, yang memuat unsur kerugian negara.

Oleh karena itu, ujarnya, KPK masih terus berkoordinasi dengan BPK terkait penghitungan kerugian negara dari kasus Hambalang. Menurut Zulkarnain, penghitungan kerugian negara memang membutuhkan waktu, karena BPK juga memeriksa sejumlah pihak. [N-8/C-6]